

# STRATEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Supriadi

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : Supriadinine666@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih kurang maksimal. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Strategi Dinas Sosial, hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam Strategi Dinas Sosial. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ? Bagaimana hambatan-hambatan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ? Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, teknik Pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa : Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis belum maksimal dalam pelaksanaan program atau kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yang menjadi hambatan-hambatan yaitu pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial merupakan kendala utama, yang menjadi upaya untuk mengatasi hambatan yaitu perlu membuat Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) ini menjadi lebih optimal, dan pengolahan data harus terpusat atau terintegrasi, dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah. Serta perlu melengkapi sarana prasarana supaya lebih memadai, ruang kerja yang nyaman dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.*

**Kata Kunci:** *Strategi, Kemiskinan, Penanggulangan*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan dewasa ini masih menjadi salah satu persoalan utama bagi Negara Indonesia, walaupun juga dialami oleh hampir semua negara

berkembang di dunia. Selain itu pula kemiskinan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri. Permasalahan kemiskinan menjadi

sumber dari banyak permasalahan sosial lainnya seperti, kriminalitas, pengangguran, kebodohan, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain-lain. Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa:

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwujud wajah, bermatra multidimensional. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat juga digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun dimensi kemiskinan menurut Suharto (2005:133) menyangkut beberapa aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

2. Aspek Politik

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

3. Aspek Sosial-Psikologis

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perlu adanya peningkatan bidang ekonomi, kestabilan politik dan keadilan sosial. Supaya dapat mengatasi permasalahan dalam kemiskinan. Maka oleh karena itu dibutuhkan penanggulangan guna memecahkan permasalahan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah baik pusat maupun Daerah Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera.

Seperti halnya upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu program-program yang dilaksanakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis adalah program Calakan, Walagri, dan Waluya yang dikhususkan pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. (Herlina dan Komariah,2017).

Kemudian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut di antaranya pengemis, waria, pekerja seks komersial (PSK), anak jalanan, serta anak telantar. Walaupun ditengarai mereka berasal dan daerah lain, pada kenyataannya mereka berada di wilayah Kabupaten Ciamis dan menjadi bagian komunitas miskin di kabupaten ini. Setiap kecamatan mempunyai proporsi penduduk miskin yang bervariasi, meskipun di beberapa kecamatan mempunyai kecenderungan penurunan laju pertumbuhan penduduk miskin, namun pada beberapa kecamatan lainnya masih memiliki kecenderungan peningkatan penduduk miskin. Salah satu kecamatan yang mempunyai kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan penduduk miskin adalah di Kecamatan Ciamis. Selain itu juga jumlah Lanjut Usia terlantar (Lansia) di Kabupaten Ciamis terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari hasil pendataan lansia terlantar yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, jumlahnya

mencapai 3.709 jiwa dan Kecamatan Ciamis merupakan yang paling banyak Lansia terlantar yang mencapai 971 jiwa.

Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Adanya Lembaga Pemerintah yakni Dinas Sosial dan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang juga memiliki tugas dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016. Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut: “Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah sesuai bidang tugasnya”.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Ciamis untuk saat ini diduga masih kurang maksimal. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di 2019 yang berada di angka 7,22 persen, hal ini belum sesuai yang tertera di RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 target tahun ke-1 persentase kemiskinan itu di angka 7,0 persen.

2. Menurut rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2018, angka Lanjut Usia Terlantar di Kecamatan Ciamis yang mencapai 971 jiwa dari total jumlah Lansia Terlantar di Kabupaten Ciamis yang berada diangka 3.709 jiwa atau sekitar 26 persen Lansia Terlantar berada di Kecamatan Ciamis.
3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Ciamis dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun sedangkan penghasilan masyarakat masih rendah yang akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat yang menurun.

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kemudian menurut Suharto (2009:30) menjelaskan bahwa:

Strategi adalah suatu usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar terjadi suatu perubahan-perubahan yang diusulkan dan dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Menurut Winardi, (2003: 106) bahwa: “Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari beberapa pendapat sebelumnya, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi.

## **2. Pengertian Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1976) Penanggulangan berasal dari kata “*tanggulang*” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “*pe*” dan akhiran “*an*”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Kemudian Arif (2011:45) menyatakan bahwa: “Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1976) menjelaskan bahwa: “Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai”. Sejalan dengan pengertian di atas Majid (2013:3) menyatakan bahwa: “Istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan”. Selanjutnya, istilah strategi banyak

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan berupaya untuk memperbaiki sesuatu”. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa penanggulangan merupakan suatu cara untuk mencegah, menghadapi dan mengatasi setiap gejala atau kejadian yang dimana meluruskan kenyataan dengan harapan.

### 3. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1976) mengatakan bahwa: “Berawal dari kata Miskin yang mengandung arti *tidak berharta*, dan *serba kekurangan*”. Sedangkan Kemiskinan Absolut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum”. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial menyatakan bahwa: “Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak”, (baik makanan maupun non makanan).

Sejalan dengan penjelasan di atas, Suryawati (2004:122) mengemukakan bahwa: “Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup”.

### 4. Jenis-jenis Kemiskinan

Secara umum ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut (Pirnas.org:2019) menyatakan bahwa:

1. Kemiskinan Subjektif. Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.
2. Kemiskinan Absolut. Bentuk kemiskinan dimana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan, seperti pemenuhan kebutuhan Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, dan Kesehatan.
3. Kemiskinan Relatif. Bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.
4. Kemiskinan Alamiah. Ini merupakan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

5. Kemiskinan Kultural. Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.
6. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

#### 5. Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005:124), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
- 2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena soal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
- 3) *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus ,bahwa

pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung.

- 4) *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- 5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

Kemudian Suharto (2005:132) mengemukakan penyebab terjadinya kemiskinan menjadi dua bagian yaitu:

1. Neo-Liberal. Yaitu, Kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, dan lemahnya kepribadian (malas, pasrah dan bodoh).
2. Demokrasi-Sosial. Yaitu, ketimpangan struktur ekonomi dan politik serta ketidakadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kemiskinan yang

timbul ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu dari proses turun-temurun atau kemiskinan yang telah diwariskan dari beberapa generasi ke generasi sehingga, budaya kemiskinan terbentuk dan telah melekat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

## **6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistemik, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan itu Huraerah (2005:56) menyatakan ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan seyogianya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain.
2. Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan

keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja, serta informasi pasar.

3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, dan evaluasi bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok agraria yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM.

Selain strategi di atas dalam era Otonomi Daerah sekarang ini yang lebih mengetahui data kemiskinan bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/kota bahkan Desa. Artinya strategi daerah menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, menggali potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis . Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan

data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2018:4) mendefinisikan bahwa: “Metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait Strategi Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif, terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait dengan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Mulgan (2009:19) menjelaskan bahwa: “Strategi publik

adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan, Publik dalam hal ini adalah orang atau masyarakat dari suatu Negara”.

Untuk bisa mencapai strategi yang telah ditentukan maka adanya konsep-konsep yang harus dipenuhi yaitu :

1. Tujuan (*purposes*)
2. Lingkungan (*environments*)
3. Menentukan arah (*direction*)
4. Aksi/tindakan (*action*)
5. Pembelajaran (*learning*)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saat ini masih belum bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya misalnya, belum maksimalnya pelaksanaan program atau kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan sosial, masih rendahnya Kecamatan Ciamis dalam pemenuhan program pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antara Kecamatan Ciamis dengan pemerintah daerah atau Dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara bahwa Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis



Kabupaten Ciamis ini memang sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Begitu juga dengan hasil analisis yang penulis ketahui bahwa Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ini juga masih belum berjalan dengan baik, karena ada beberapa permasalahan yang menyebabkan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis belum optimal seperti halnya, masih kurangnya sosialisasi dalam penerapan kebijakan atau program yang akan diambil oleh Dinas atau Pemerintah, masih kurangnya di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin serta meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara antara lain adalah mengenai hambatan ada pada data kemiskinan yang belum terintegrasi secara optimal, serta layanan rujukan terpadu belum terbangun dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah serta organisasi masyarakat, kemudian faktor lainnya yaitu masih rendahnya pembinaan bagi keluarga miskin dan masih rendahnya intensitas pembinaan kepada yayasan atau panti yang

menjalankan usaha kesejahteraan sosial yang membuat strategi yang adapun sulit untuk diimplementasikan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan sarana prasarana belum sepenuhnya memadai serta koordinasi antar berbagai elemen internal dan eksternal belum optimal. Berdasarkan hasil analisis Masalah pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial merupakan kendala utama dan juga memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Dan dapat dilihat mengenai hambatan mungkin ada pada program atau kebijakan yang hanya berakhir di secarik kertas saja, tindak lanjutnya yang masih kurang optimal dan bahkan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis maka perlu membuat Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini menjadi lebih optimal, dan pengolahan data harus terpusat atau terintegrasi, dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah. Serta perlu melengkapi sarana prasarana supaya lebih memadai, ruang kerja yang nyaman dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan kebijakan yang lain, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik masyarakat maupun

perangkat daerahnya dengan melakukan berbagai pelatihan. Dan diharapkan Pemerintah Daerah bersama Dinas terkait dapat mengutamakan permasalahan mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat supaya perekonomian masyarakat terus berjalan. Berdasarkan hasil analisis sehingga dilakukan upaya oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penanggulangan angka kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat dan keluarga miskin agar bisa lebih mandiri dan bisa berinovasi guna meningkatkan perekonomian rumah tangganya, serta menjalankan beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mendaftarkan program yang ada di kabupaten maupun kecamatan. Agar masyarakat di desa dapat menerima bantuan yang merata dan adil, juga mengoptimalkan koordinasi baik antar lembaga pemerintah maupun instansi dengan organisasi masyarakat lainnya agar umpan balik dapat terasa manfaatnya bagi pemerintah dan juga masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saat ini masih belum bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya misalnya, belum maksimalnya pelaksanaan program atau kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan

kesejahteraan sosial, masih rendahnya Kecamatan Ciamis dalam pemenuhan program pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antara Kecamatan Ciamis dengan pemerintah daerah atau Dinas terkait dalam penanggulangan

Hambatan yang terjadi yaitu data kemiskinan yang belum terintegrasi secara optimal, serta layanan rujukan terpadu belum terbangun dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah serta organisasi masyarakat, kemudian faktor lainnya yaitu masih rendahnya pembinaan bagi keluarga miskin dan masih rendahnya intensitas pembinaan kepada yayasan atau panti yang menjalankan usaha kesejahteraan sosial yang membuat strategi yang adapun sulit untuk diimplementasikan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan sarana prasarana belum sepenuhnya memadai serta koordinasi antar berbagai elemen internal dan eksternal belum optimal

Upaya yang harus dilakukan yaitu pengolahan data harus terpusat atau terintegrasi, dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah. Serta perlu melengkapi sarana prasarana supaya lebih memadai, ruang kerja yang nyaman dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan kebijakan yang lain, meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia baik masyarakat maupun perangkat daerahnya dengan melakukan berbagai pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdul Majid. 2013. *Strategi Pembelajaran. Remaja Rosdakarya*: Bandung

Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Geoff, Mulgan. 2009. *The Art of Public Strategi*. Oxford University Press

Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Kiblat

Ritonga, Hamonangan. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor

Suryawati, Chriswardani. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jurnasy

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian sosial*. Bandung : Reflika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.

Van Poelje, G.A., Prof. Dr., 1959. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: NV Soroengan

Winardi, J. 2003. *Entrepreneur Dan Entrepreneurship*. Jakarta : Prenada Media.

### Sumber Jurnal

Nina Herlina, S.H., M.H. dan Mamay Komariah, S.H., M.H. 2017. *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis*. Vol 5 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Galuh.

### Sumber Skripsi

Rina Fitriani. 2013. *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejagata*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang; Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Irfan Rosyid Khoiruddin. 2017. *Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengatasi Kemiskinan*". Program Studi Ilmu Sosiatri / Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmid" Yogyakarta
- RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2006-2025
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2017. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Pendudukan*. Jawa Barat
- DINSOS (Dinas Sosial). 2017. *Jumlah Penduduk Miskin*. Kabupaten Ciamis
- DINSOS (Dinas Sosial). 2018. *Jumlah Penduduk Miskin*. Kabupaten Ciamis

#### Sumber Dokumen

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

#### Sumber Internet

- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online)
- TNP2K. 2015. *Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data*. Jakarta: TNP2K
- <https://www.harapanrakyat.com/2019/1/1/bps-angka-kemiskinan-di-ciamis-turun/>
- <https://www.radartasikmalaya.com/465-615-warga-ciamis>